



# REVIU

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

# 2015 - 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

**REVIU  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU  
TAHUN 2015-2019**

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU  
TAHUN 2015-2019**

ISBN : 979.484.707.0  
No. Publikasi : 14.511.2015.14  
Katalog BPS : 1201005.14  
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 67

Naskah:

Bagian Tata Usaha

Gambar Kulit

Bagian Tata Usaha

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU NOMOR 070 TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2019**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015-2019, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Nomor 070 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643).
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Nomor 070 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2019
- KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Februari 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU

  
Mawardi Arsad

## KATA PENGANTAR

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Provinsi Riau Tahun 2015-2019 merupakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan Reviu Renstra BPS RI Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015-2019 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan nasional dan daerah.

Reviu Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019 disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan BPS Provinsi Riau dan juga perubahan pada Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi. Reviu Renstra ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dan jajaran BPS Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan perstatistikan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Reviu/Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah Visi, Misi dan Tujuan Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Reviu Renstra BPS Provinsi Riau ini disampaikan penghargaan dan terimakasih atas masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, Maret 2016  
Kepala BPS Provinsi Riau



Mawardi Arsad

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan BPS Provinsi Riau sebagai instansi vertikal BPS di daerah juga memiliki kewenangan yang sama dengan BPS secara umum untuk level daerah.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Riau jangka menengah tahun 2015-2019, BPS Provinsi Riau menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan melakukan reviu karena adanya perubahan pada indikator kinerja. Renstra ini mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Provinsi Riau untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini dan mengacu pada Renstra BPS RI, BPS Provinsi Riau menetapkan visi sebagaimana visi BPS RI yakni: "Pelopor data statistik terpercaya untuk semua". Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Provinsi Riau merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Provinsi Riau memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Provinsi Riau dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; (3) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran dalam Reviu Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019 ini akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Riau untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum.....	2
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	6
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPS</b>	
2.1 Visi BPS.....	11
2.2 Misi BPS.....	12
2.3 Tujuan BPS.....	16
2.4 Tujuan BPS Provinsi Riau.....	18
2.5 Sasaran Strategis BPS.....	19
2.6 Nilai-Nilai Inti BPS.....	22
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Riau.....	26
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Riau.....	28
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1 Target Kinerja.....	39
4.2 Kerangka Pendanaan.....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Penutup.....	45
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Riau.....	47

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2-1	Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019..... 12
Tabel 2-2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS..... 16
Tabel 2-3	Indikator Tujuan dan Target BPS 2015-2019..... 18
Tabel 2-4	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Riau..... 19
Tabel 3-1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPS Provinsi Riau..... 29
Tabel 3-2	Program dan Kegiatan BPS Provinsi Riau..... 33
Tabel 4-1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... 39
Tabel 4-2	Matriks Pendanaan..... 43

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3-1 Tujuan Pembangunan Nasional.....	23

## DAFTAR SINGKATAN

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
BMN	Barang Milik Negara
BPS	Badan Pusat Statistik
Cerdas	<i>Change and Reform for the Development of Statistics</i>
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	Indikator Kinerja Program
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JFU	Jabatan Fungsional Umum
JFT	Jabatan Fungsional Tertentu
K/L	Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
NSO	National Statistics Offices
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Program DMPTTL	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPIS	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PST	Pelayanan Statistik Terpadu
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SE	Sensus Ekonomi
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	System National Account
SSN	Sistem Statistik Nasional

Statcap	Statistical Capacity Building
UNSTAT	United Nations Statistics Division
WBBM	Wilayan Bersih, Bebas dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana, kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang didalamnya terdapat titik krusial berupa penentu outcome dan output pada level strategis, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting System*).

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2014, perlu disusun perencanaan dan evaluasi yang tepat, komprehensif dan terukur. Selaras dengan hal di atas, Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang disusun Kementerian/Lembaga harus mengacu kepada RPJM Nasional 2015-2019. Perpres No. 2 Tahun 2015 juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2015-2019 dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

BPS Provinsi Riau sebagai instansi vertikal BPS di daerah mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat,

mutakhir, berkelanjutan, dan relevan. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan efisien, efektif dan akuntabel.

Penyusunan Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra BPS RI Tahun 2015-2019, yang disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019 juga diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dengan visi: **Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu, dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, serta pematapan aparatur.** Renstra yang disusun ini menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Riau dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional dan regional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS Provinsi Riau dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik yang berkualitas.

## 1.2. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Riau menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMD lima tahun kedua 2010-2014. Provinsi Riau memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah maupun nasional. Sumber daya alam Riau yang menjadi potensi unggulan antara lain: pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan disamping industri dan jasa.

Gambaran pertumbuhan ekonomi Riau (Tanpa Migas) Tahun 2009-2013 secara umum lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional kecuali tahun 2013, dan pertumbuhan ekonomi Riau pada periode tersebut juga tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 6,56%, dan terus meningkat menjadi 7,86% pada tahun 2012. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Riau mengalami penurunan dengan besaran hanya 6,13%. Adapun Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2013 mencapai Rp 522,24 triliun, dan tanpa migas sebesar 340,45 triliun dengan pendapatan per kapita dengan migas sebesar Rp79,13 juta dan tanpa migas sebesar Rp. 51,61 juta. Pada Tahun 2014, PDRB Riau telah mencapai Rp. 697,69 triliun, atau berkontribusi sekitar 6,45% terhadap perekonomian nasional.

Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,60% pada tahun 2009 menjadi 77,25% pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 9,45% di tahun 2009, menjadi 8,42% pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,56% di tahun 2009, menjadi 5,48% pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti perekonomian, pendidikan dan kesehatan mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMD periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Provinsi Riau pada periode berikut. Pembangunan Riau dalam RPJMD periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan daya saing dan kesejahteraan masyarakat sehingga menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, tersedianya lapangan kerja dan peningkatan profesionalisme dan etos kerja aparatur pemerintah. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2014 yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga dan prioritas daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Riau diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat didasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis.

Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

- a) agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;



- b) menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
- c) agar terjadi suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan diantaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi statistik yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami. BPS telah melaksanakan dan menghasilkan berbagai informasi statistik melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
2. Data Pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Hortikultura, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan, dan Indikator Pertanian lainnya.
3. Angka Inflasi/Indeks Harga Konsumen, PDRB triwulan dan tahunan, ekspor dan impor, industri Besar/ Sedang, Nilai Tukar Petani, Survei Industri Mikro dan Kecil, Statistik Harga Perdagangan Besar, Indeks Kemahalan Konstruksi, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di Bidang Jasa Pariwisata, Survei Hotel dan Restoran, Pola Distribusi, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen serta berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)  
Sampai dengan bulan September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS RI telah melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data. Aplikasi Silastik dioperasikan di BPS RI.
2. Sistem perpustakaan *online* (*Digilib*)  
Jumlah kunjungan perpustakaan *online* terus mengalami peningkatan, hingga September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan *online*. Evaluasi jumlah pengunjung *Digilib* dilakukan oleh BPS RI.
3. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa)  
Pemanfaatan SiRusa sebagai *repository* kegiatan statistik di Indonesia juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013 kunjungan SiRusa tercatat sebanyak 97.768 pengunjung.
4. Sistem katalog mikrodata  
System katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (mikrodata) yang dikelompokkan ke dalam Koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.
5. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website*. Pada tahun 2014, pengunjung *website* BPS Provinsi Riau mencapai 45.864 pengunjung.
6. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota. Selama Tahun 2014, Pengunjung PST di BPS Provinsi Riau mencapai 2.844 orang. Dan pada Tahun 2014, PST BPS Provinsi Riau mendapat penghargaan Peringkat II Unit Pelayanan Informasi Publik BPS Provinsi se Indonesia Tahun 2014.

Dalam mendukung terciptanya *good governance and clean government* dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Provinsi Riau telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Penghargaan sebagai Pengelola Terbaik dibidang Pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN) Tahun 2012 untuk kelompok wilayah dengan jumlah unit Kuasa Pengguna Barang dari 11 s.d 19 satuan kerja oleh Kepala BPS RI pada tanggal 26 November 2013.

2. Penghargaan sebagai Koordinator Wilayah Terbaik I di Lingkungan Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri untuk kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Provinsi Riau tahun 2012 yang diserahkan pada tanggal 30 November 2013.
3. Peringkat VII dalam Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja lingkup KPPN Pekanbaru Tahun Anggaran 2013 yang dikukuhkan pada tanggal 21 Mei 2014.
4. Penghargaan sebagai Juara 1 Pengelolaan BMN Tahun 2013 Wilayah Provinsi Riau oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara, yang diserahkan pada tanggal 6 November 2014
5. Penghargaan sebagai Juara 2 Penatausahaan BMN Tahun 2013 Wilayah Provinsi Riau oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara, yang dikukuhkan pada tanggal 6 November 2014.
6. Penghargaan sebagai Satker Terbaik I kategori pengelolaan BMN di Lingkungan KPKNL Kota Pekanbaru oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau yang diserahkan pada tanggal 6 November 2014.

### **1.3. Potensi dan Permasalahan**

#### **1.3.1. Potensi**

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya *National Statistics Offices (NSO)* negara lain, BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistic*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Standar ini juga menjadi acuan bagi BPS daerah dalam melaksanakan kegiatan perstatistikan di wilayah masing-masing. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*) baik bilateral maupun multilateral dan

berkontribusi untuk perbaikan sistem *official statistics* diberbagai negara. Kemampuan BPS di dalam pengembangan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional. Demikian juga dengan BPS Provinsi Riau telah melakukan banyak kerjasama dengan pemerintah daerah.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan maupun diseminasi. Rencana penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile application* ini menjadikan penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.

Perkembangan global yang semakin terhubung dan permintaan keterbukaan data serta transparansi yang semakin tinggi mendorong setiap NSO untuk berkolaborasi secara bilateral maupun multilateral. Bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tanggal 31 Desember 2015 mendatang, akan menjadikan Asean sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang mengakibatkan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja berlangsung dengan tanpa hambatan. Konsekuensi integrasi ekonomi ini mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saing perekonomiannya, yang tentunya dimulai dari daerah. Dalam upaya peningkatan daya saing tersebut dibutuhkan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik Negara-negara lain terutama di kawasan Asia Pasifik. Tersedianya keterbandingan data statistik ini sebagai penunjang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

### **1.3.2. Permasalahan**

BPS Provinsi Riau telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2015-2019, baik permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS Provinsi Riau) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi Riau harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua dapat terus meningkat.

Kebutuhan pengguna data statistik terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas tersebut.

Permasalahan umum dalam kegiatan statistik terutama untuk mengumpulkan data adalah *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Permasalahan ini perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha agar informasi yang disampaikan lebih akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui dan yang sebenarnya terjadi.

Pemekaran wilayah membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. BPS daerah harus cepat dan tanggap untuk menyediakan data bagi kebutuhan pemerintahan daerah yang baru. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum semua dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau baik karena faktor geografis maupun faktor transportasi mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyajian data tersebut. Disisi lain keterbatasan jumlah petugas statistik yang profesional di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk

mendukung operasional BPS, baik di BPS Pusat maupun BPS daerah. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* di BPS Pusat, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Secara umum pengolahan data hasil survei di BPS Provinsi Riau menggunakan system aplikasi yang dikembangkan oleh BPS RI. Hanya beberapa aplikasi pengolahan data hasil survei kerjasama dengan pemerintah daerah yang dikembangkan secara mandiri.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS, peran sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM di BPS Daerah berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Riau saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia.

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan *response rate* yang rendah. Selain itu belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN BPS**

---

#### **2.1. Visi BPS**

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi Pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dan visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu, dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, serta pemantapan aparatur”, BPS Provinsi Riau berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional dan regional di bidang statistik.

Pembangunan nasional dan regional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1). Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkat wilayah kecil; 2). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3). Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS Provinsi Riau untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Daerah Riau 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional, daerah dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019:

**“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**  
**(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)**

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyedia statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai



hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data di daerah, nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberi ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

## 2.2. Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Sejalan dengan hal ini BPS Provinsi Riau juga mempunyai misi yang sama dengan Misi BPS RI.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019**

MISI BPS PROVINSI RIAU 2015-2019	
VISI BPS 2015-2019	<b>Peloporan data statistik terpercaya untuk semua</b>
	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
	2. Memperkuat System Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
	3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi BPS tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

**Menyediakan data statistik..**

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 tahun 2007).

**...berkualitas...**

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

**...melalui kegiatan statistik yang terintegrasi...**

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”.(UU No. 16 tahun 1997).

**...dan berstandar nasional maupun internasional...**

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standard dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistic*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambung melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;

### **Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...**

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan”. (UU No. 16 tahun 1997).

### **...Pembinaan dan koordinasi...**

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembekuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (UU No. 16 tahun 1997).

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik). Koordinasi dan kerjasama serta pembinaan kegiatan statistik juga dilakukan di daerah dengan koordinator BPS provinsi/kabupaten/kota.

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Provinsi Riau dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Riau sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik, meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;

- e. Pengembangan system informasi statistik;
- f. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS Provinsi Riau, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

**Membangun insan statistik...**

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni professional, berintegritas, dan amanah”.

**...yang professional...**

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

**...berintegritas...**

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan prilaku dalam melaksanakan profesi/ tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran,

pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggungjawab dan setiap langkahnya terukur)".

**...amanah...**

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan statistik".

### 2.3. Tujuan BPS

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Rumusan tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan dibawah ini.

**Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019**

		MISI BPS 2015-2019
VISI BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
TUJUAN 2019		1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:
  - 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
  - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
  - 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
  - 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:
  - 3.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
  - 3.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
4. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
  - 4.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama; pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform For Development of Statistics in Indonesia*) sebagai kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua merupakan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini

ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua STATCAP CERDAS yaitu penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga; penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.

Tujuan keempat; peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga STATCAP CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia.

#### **2.4. Tujuan BPS Provinsi Riau**

Tujuan BPS Provinsi Riau diadopsi dari tujuan BPS pusat, tetapi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:
  - 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
  - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
  - 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
  - 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

3. Tujuan 3 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:

3.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2-3 Tujuan dan indikator Tujuan BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019**

No.	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	85%	85%	86%	87%
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	90%	90%	91%	91%
3	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	55	68	68	69	70

## 2.5. Sasaran Strategis BPS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Provinsi Riau, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS Provinsi Riau terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (*pelayanan eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat mendukung program teknis atau administrasi BPS (*pelayanan internal*). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Riau sebagai berikut:



**Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Riau**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional dan regional dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS Provinsi Riau untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik", adalah:
  - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS  
Dengan indikator sasaran:
    - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
    - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
    - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
    - 1.1.4. Jumlah *release* data statistik yang tepat waktu
    - 1.1.5. Jumlah publikasi/ laporan yang terbit tepat waktu
    - 1.1.6. Jumlah publikasi/ laporan sensus yang terbit tepat waktu

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)

Dengan indikator sasaran:

1.1.1 Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga

1.1.2 Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha

1.1.3 Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik", adalah:

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Dengan indikator sasaran:

2.1.1. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Data BPS;

2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

2.1.3. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional;

2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS;

2.1.5. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", adalah:

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Dengan indikator sasaran:

3.1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal diploma IV/S1

3.2. Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan indikator sasaran:

3.2.1 Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat

## 2.6. Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Inovatif, dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsestan, Terbuka, dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus, dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai inti ini sebagai berikut:

### 1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten  
Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. Efektif  
Memberi hasil maksimal,
- c. Efisien  
Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. Inovatif  
Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. Sistemik  
Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

### 2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi  
Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
  - b. Disiplin  
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
  - c. Konsisten  
Selarasnya kata dengan perbuatan,
  - d. Terbuka  
Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
  - e. Akuntabilitas  
Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.
3. Amanah
- Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Terpercaya  
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
  - b. Jujur  
Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
  - c. Tulus  
Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
  - d. Adil  
Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ketiga tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 tahun 2005-2009, RPJMN ke-2 tahun 2010-2014, RPJMN ke-3 tahun 2015-2019 dan RPJMN ke-4 tahun 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagai berikut:



**Gambar 3-1 Tujuan Pembangunan Nasional**

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Kemampuan Bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan

peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, 5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, 6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 7) mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, 8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Berdasarkan arah kebijakan umum tersebut, ditetapkan Agenda Pembangunan beserta sasarannya yang mencakup: 1) Agenda pembangunan ekonomi, 2) agenda pembangunan pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

Untuk kemajuan prioritas perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas dalam pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 yang disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu – menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program *Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (STATCAP CERDAS)* sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), dan penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda ini dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan sebagainya.
8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung

agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).

9. Nawacita kesembilan – Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi Indonesia, dan lain sebagainya.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Riau**

Dalam mengimplementasikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau ditetapkan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih.

Misi Pembangunan Provinsi Riau kaitannya dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS Provinsi Riau antara lain:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, pemukiman, air, listrik dan sebagainya, BPS Provinsi Riau mendukung kebijakan tersebut dengan menyediakan antara lain data Potensi Desa, data kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Arah kebijakan ini didukung oleh BPS Provinsi Riau dengan menyediakan antara lain: data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mendukung melalui jalur pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan sebagainya.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Arah kebijakan ini didukung oleh BPS Provinsi Riau dengan data statistik kesehatan, data Indeks Pembangunan Manusia, Survei Demografi dan Kesehatan, dan sebagainya.
4. Menurunkan kemiskinan dengan arah kebijakan menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan akses



terhadap asset dan permodalan serta pengendalian inflasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. BPS Provinsi Riau mendukung arah kebijakan ini dengan menyediakan data Jumlah penduduk miskin, data kesejahteraan rakyat dan data inflasi.

5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dan peningkatan stabilitas keamanan masyarakat. Arah kebijakan ini didukung BPS Provinsi Riau dengan menyediakan data yang berkaitan dengan nilai kebangsaan dan keamanan, statistik ketahanan sosial dan sebagainya.
6. Pembangunan Masyarakat yang berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa dengan arah kebijakan pelestarian nilai-nilai Melayu, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, peningkatan partisipasi pemuda, peningkatan kualitas hidup beragama, peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. BPS mendukung arah kebijakan ini dengan menyediakan data ketahanan sosial, data demografi, dan sebagainya.
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan dengan arah kebijakan pemenuhan cukupan konsumsi pangan masyarakat, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk-produk pertanian. BPS mendukung arah kebijakan ini dengan menyediakan data konsumsi, data produksi pertanian, luas penggunaan lahan dan sebagainya.
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata dengan arah kebijakan peningkatan kualitas air dan udara, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi wisata. Arah kebijakan ini didukung BPS Provinsi Riau dengan menyediakan data lingkungan hidup, pariwisata, kunjungan tamu asing, data perhotelan, restoran dan sebagainya.
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan peran swasta, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keahlian serta ketrampilan tenaga kerja. BPS mendukung arah kebijakan ini dengan menyediakan data ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, data pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sebagainya.

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Riau

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS Provinsi Riau menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

**Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		
T1	Peningkatan Kualitas Data Statistik	SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	a.	Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas	
						b.	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik	
						c.	Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional	
		SS2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>responden engagement</i> )	1.	Peningkatan <i>response rate</i>	a.	Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,	
						b.	Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS	
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	a.	Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik	
							b.	Meningkatkan <i>customer relationship</i>
							c.	Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
				2.	Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	a.	Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai	
						b.	Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.	
				3.	Pemenuhan sarana dan Prasarana BPS secara akuntabel	a.	Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	
						b.	Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.	

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
				4.	Peningkatan pengguna data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	a.	Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik
T3	Peningkatan Birokrasi yang akuntabel	SS4	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1.	Penguatan fungsi yang terkait dengan system manajemen aparatur pengawasan akuntabilitas kinerja	a.	Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan system manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif
		SS5	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			b.	Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,
				2.	Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	a.	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimal-kan penyimpangan penggunaan anggaran,
						b.	Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

### 3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (RPJMN dan RPJMD Riau Tahun 2015–2019) dan yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS Provinsi Riau dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015-2019. Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui

penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Transportasi, Produksi Padi dan Palawija, Luas Lahan, Industri, Pertambangan, Konstruksi, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

### **3.3.2. Program dan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS Provinsi Riau 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS Provinsi Riau mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program PPIS di BPS Provinsi Riau merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS RI.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL, dan Program PSPA. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Provinsi, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi di daerah. Prioritas kegiatan BPS Provinsi Riau dilaksanakan dengan didasarkan kepada: a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau. Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Tabel.3-2 Program dan Kegiatan BPS Provinsi Riau

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas,</li> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,</li> <li>Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.</li> </ol>	PPIS PSPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPS Provinsi</li> </ul>
	SS.2. Meningkatkan Kualitas hubungan Dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )	1. Peningkatan <i>response rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data</li> <li>Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS</li> </ol>	PPIS DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,</li> <li>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik</li> <li>Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i></li> <li>Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS</li> </ol>	PPIS DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,</li> <li>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> </ul>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas <i>website</i> BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai</li> <li>Mengoptimalkan system informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data dan informasi statistik</li> </ol>	PPIS PSPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</li> </ul>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan sarana &amp; prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik</li> </ol>	PSPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</li> </ul>



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.</p>	PSPA	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi,
		<p>4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p>	<p>1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik</p>	PPIS DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,</li> <li>• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> <li>•</li> </ul>
T.3. Peningkatan Birokrasi yang akuntabel	<p>SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</p> <p>SS.5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</p>	<p>1. Penguatan fungsi yang terkait dengan system manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi</p>	<p>1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,</p> <p>2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik</p>	DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>3. Mengoptimalkan penyediaan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata computer) yang baru.</p>	DMPPTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> </ul>
		<p>2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan Anggaran,</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</p>	DMPPTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS Provinsi,</li> </ul>

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS Provinsi Riau, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015–2019, yaitu sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)**, dengan kegiatan:
  - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
2. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)**, dengan kegiatan:
  - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi.
3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)**, dengan kegiatan:
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

---

#### **4.1. Target Kinerja**

Berdasarkan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Riau 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

##### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Riau untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator sasaran Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2015-2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (2019)
T.1 Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1 Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	87%
		IKSS 1.2 Persentase Konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	80%
		IKSS 1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%
		IKSS 1.4 Jumlah Release data yang tepat waktu.	16
		IKSS 1.5 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.	39
		IKSS 1.6 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.	2

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (2019)
	SS.2. Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>Respondent Engagement</i> )	IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rusaha	98.90% 94.80%
		IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	97.80%
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>User Engagement</i> )	IKSS 3.1 Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS 3.2 Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website BPS</i> IKSS 3.3 Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	86% 22.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (2019)
		IKSS 3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	75%
		IKSS 3.5 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	85%
T.3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	30%
		IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	75%
	SS.5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70

#### 4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

4. **Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)**, dengan kegiatan:
  - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
5. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)**, dengan kegiatan:
  - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi.
6. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)**, dengan kegiatan:
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Riau dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Riau. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel. 4-2 Matriks Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	11,083.348	13,973.94	12,333.85	6,366.09	9.272.16
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi.	9,755.116	10,426.06	11,572.93	12,845.95	14,259.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.	1,921.066	641.36	833.77	1,083.91	1,806.07

## **BAB IV PENUTUP**

---

Mengingat pentingnya peran data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS Provinsi Riau menentukan strategi-strategi penguatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau 2015-2019, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional.

Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran.1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Riau

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Satuan Kerja: BPS Provinsi Riau						22,759.54	20,041.36	20,740.55	20,295.95	22,237.24	
	SS1. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna terhadap kualitas data BPS											BPS Provinsi Riau
	1.1 Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	80	85	84	86	87						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS, Bid. IPDS
	1.2 Persentase Konsumen yang selalu menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai rujukan utama	75	75	77	79	80						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS, Bid. IPDS
	1.3 Persentase Pemutakhiran MFD dan MBS	100	100	100	100	100						Bidang IPDS
	1.4 Jumlah release data statistic yang tepat waktu	16	16	16	16	16						
	1.5 Jumlah Publikasi /Laporan yang terbit tepat waktu	43	42	44	44	41						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS, Bid. IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja				Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	1.6 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	10	2	4	4	-						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS, Bid. IPDS
	<b>SS2. Meningkatkan Kualitas Hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)</b>											<b>Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS, Bid. IPDS</b>
	2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan rumahtangga	98.6	98.6	98.7	98.8	98.9						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS,
	2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan usaha	94.41	94.41	94.50	94.70	94.80						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS
	2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan non	97.27	97.26	97.50	97.65	97.80						Bid. Sosial, Bid. Produksi, Bid. Distribusi, Bidang NWAS
	<b>SS3. Meningkatkan Kualitas Hubungan dengan Pengguna data (User Engagement)</b>											<b>Bidang IPDS</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja				Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	SS3. Meningkatkan Kualitas Hubungan dengan Pengguna data ( <i>User Engagement</i> )											Bidang IPDS
	3.1 Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84	90	90	91	91						Bidang IPDS
	3.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS Prov. Riau	45,000	19,000	20,000	21,000	22,000						Bidang IPDS
	3.3 Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	-	5.75	6.00	6.50	7.00						Bidang IPDS
	3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	94,00	94.74	95,00	95.25	95.50						Bagian Tata Usaha, Bidang IPDS
	3.5 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	85	90	90	91	91						Bidang IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SS4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS												Bagian Tata Usaha
	4.1 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	23	25	27	29	30							Bagian Tata Usaha
	4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal DIV atau Strata 1	70	72	73	75	75							Bagian Tata Usaha
	SS5. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS												Bagian Tata Usaha
	5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	55	68	68	69	70							Bagian Tata Usaha

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik/ Kegiatan 2895: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi							11.083.351	13.973.94	12.333.85	6.366.09	9.272.16	BPS Provinsi Riau
	Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	1	1	1	1	1						Bidang IPDS
	Persentase Pemutakhiran MFD dan MBS	100	100	100	100	100						Bidang IPDS
	Jumlah Peta dan BS yang diupdate	202	202	202	205	210						Bidang IPDS
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik	1	1	1	1	1						Bidang IPDS
	Jumlah laporan diseminasi statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						Bidang IPDS



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	3	2	2	3	3						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	3	2	2	3	3						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	3	2	2	3	3						Bidang Sosial
	Persentase Pemasukan dokumen (Response rate) Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan pendekatan rumahtangga	99.70	99.70	99.75	99.80	99.85						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk				1	1						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu				1	1						Bidang Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja				Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019			
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus	1												Bidang Sosial	
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1													Bidang Sosial
	Persentase Pemasukan dokumen (Response rate) Survei Penduduk Antar Sensus	100													Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bidang Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	98.13	98.50	98.70	99.00	99.25						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan yang terbit tepat waktu	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	97.63	97.70	97.85	98.00	98.30						Bidang Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga	100	100	100	100	100						Bidang Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	98.13	98.50	98.70	99.00	99.25						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan yang terbit tepat waktu	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	5	4	4	5	4						Bidang Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	97.63	97.70	97.85	98.00	98.30						Bidang Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga	100	100	100	100	100						Bidang Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa	1			1								Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang terbit tepat waktu	1			1								Bidang Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa	100			100								Bidang Sosial
	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	1											Bidang Sosial
	Persentase pendataan Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100											Bidang Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	6	6	6	6							Bidang Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	7	6	6	6	6						Bidang Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	7	6	6	6	6						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan rumahtangga	85.05	85.05	85.05	85.49	85.49						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	56.58	56.58	56.58	58.33	58.33						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan non umah tangga dan non usaha	97.65	97.75	97.80	97.90	98.00						Bidang Produksi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						<b>Bidang Produksi</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	5	2	2	2	2						Bidang Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	5	2	2	2	2						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	76.92	76.92	76.92	92.31	92.31						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan usaha	54.41	54.41	54.41	63.24	63.24						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan non usaha	81.43	81.50	81.65	81.80	82.15						Bidang Produksi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, Penggalan, Energi dan Konstruksi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>						<b>Bidang Produksi</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, Penggalan, Energi dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						Bidang Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, Penggalan, Energi dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						Bidang Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Industri, Pertambangan, Penggalan, Energi dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	92.35	92.60	92.80	93.11	93.58						Bidang Produksi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>						<b>Bidang Distribusi</b>
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	3	4	4	4	3						Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	3	2	2	2	2						Bidang Distribusi



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Distribusi dengan pendekatan usaha	93.26	93.50	93.80	94.00	94.35						Bidang Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	98.96	99.25	99.40	99.40	99.50						Bidang Distribusi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						<b>Bidang Distribusi</b>
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016		1	1	1	1						Bidang Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016		85.00	85.00	88.00	88.00						Bidang Distribusi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>						<b>Bidang Distribusi</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	5	5	6	7	6						Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	4	4	4	4	5						Bidang Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Harga dengan Pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						<b>Bidang Distribusi</b>
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Harga dengan Pendekatan usaha	100	100	100	100	100						Bidang Distribusi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup</b>			<b>1</b>	<b>1</b>							<b>Bidang Distribusi</b>
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup yang terbit tepat waktu			1	1							Bidang Distribusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Biaya Hidup			100	100								Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			1									Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu			1									Bidang Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			100									Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata	3	3	3	3	3							Bidang Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3							Bidang Distribusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3							Bidang Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	95.89	96.10	96.40	96.85	97.00							<b>Bidang Distribusi</b>
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	100	100	100	100	100							Bidang Distribusi
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi</b>	2	2	2	2	2							<b>Bidang Neraca Wilayah &amp; Analisis Statistik</b>
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2							Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2							Bidang Distribusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha	94.55	94.80	95.10	95.40	95.60						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	2	2	2	2	2						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	96.36	96.50	96.70	96.85	97.15						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha	90.90	91.10	91.35	91.68	91.82						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90.90	91.10	91.35	91.68	91.82						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						<b>Bidang Neraca Wilayah &amp; Analisis Statistik</b>
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	3	2	2	2	2						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	3	2	2	2	2						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan Usaha	98.18	98.30	98.45	98.70	98.86						Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS/ Kegiatan 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Prov.</b>							<b>9,755.116</b>	<b>10,426.06</b>	<b>11,572.93</b>	<b>12,845.95</b>	<b>14,259.01</b>	<b>Bagian Tata Usaha</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen <sup>6</sup>	41	40	40	40	40							Bagian Tata Usaha
	Persentase Pembayaran Upah dan Gaji tepat Waktu	100	100	100	100	100							Bagian Tata Usaha
	Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kondisi baik	90	90	92	92	93							Bagian Tata Usaha
	Persentase Sarana dan Prasarana lainnya dalam kondisi baik	85	86	87	88	90							Bagian Tata Usaha
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan 2891: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</b>						1,921.066	641.36	833.77	1,083.91	1,806.07		Bagian Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	29	30	32	30	32							Bagian Tata Usaha

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Persentase Pengadaan Kendaraan Bermotor yang diselesaikan	100	100	100	100	100							Bagian Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	65	84	47	76	27							Bagian Tata Usaha
	Persentase Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100							Bagian Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan peralatan dan fasilitas	135	146	611	236	12							Bagian Tata Usaha
	Persentase Pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100	100	100	100	100							Bagian Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan tanah, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/ bangunan	105	600	1040	902	1							Bagian Tata Usaha



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja				Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Persentase Pengadaan tanah, rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung/ bangunan yang diselesaikan	100	100	100	100	100							Bagian Tata Usaha



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru, 28131

Telp. (0761) 23042 Fax. (0761) 21336

Homepage: <http://riau.bps.go.id> Email: [bps1400@bps.go.id](mailto:bps1400@bps.go.id)